



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

KATA PENTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023. LKIP SKPD Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Marabahan, 02 Pebruari 2024

Kepala DPPKBP3A
Kabupaten Barito Kuala

H. PURKAN, SH
NIP. 19650103 199203 1 010

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	LATAR BELAKANG	
	1.1. Gambaran Umum Organisasi Kedudukan DPPKBP3A	2 2
	1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	5 6
BAB II	1.3. Isu Strategis Organisasi	7
	1.4. Landasan Hukum	
BAB III	1.5. Sistematika Penyusunan.....	9
	PERENCANAAN KINERJA	11
	2.1. Perencanaan Strategis	
BAB IV	2.2. Perjanjian Kinerja	36
	AKUNTABILITAS KINERJA	
	3.1. Capaian Kinerja DPPKBP3A.....	38
	3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Startegis	43 47
	3.3. Akuntabilitas Keuangan	
	PENUTUP	48
	4.1. Kesimpulan	49
	4.2. Kendala yang Dihadapi atas Capaian Kinerja DPPKBP3A	50
	4.3. Saran/Rekomendasi/Pemecahan	
	4.4. Peluang yang Ada dalam Upaya Pengembangan Pelayanan DPPKBP3A.....	

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi

DAFTAR TABEL

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS..... 9

2.1 Tabel Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja serat target Kinerja Eselon II.....	10
2.2 Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2022.....	11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 15

3.1 Tabel Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	15	3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang tidak tercapai.....	16	

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambar Struktur Organisasi DPPKBP3A Kab. Barito Kuala.....	5
--	---

• Mekanisme Penyusunan

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) di tahun 2023 secara bertahap bermaksud Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang Melalui Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Menuju Keluarga Kecil Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing, hal tersebut sebagaimana visi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026.

Guna mewujudkan visi dimaksud diantara tujuan utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Keluarga Berencana, Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai perlakuan yang salah, tindak Kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga balita, anak, remaja dan lansia dalam pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Mengacu pada tujuan utama dimaksud, maka terdapat 6 (enam) Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan KB
2. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) masyarakat tentang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta dalam kemampuan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
3. Meningkatnya Peran Kelompok UPPKA
4. Terpenuhi Hak Anak
5. Meningkatnya Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG
6. Meningkatnya penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
7. Upaya Percepatan Penurunan Stunting

• **Mekanisme Pengukuran**

Prioritas kebijakan pembangunan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Barito Kuala adalah “Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap program KB dengan peningkatan kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Terjaminnya Kesetaraan Gender”.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Barito Kuala pada tahun 2023 telah menetapkan 6 (enam) tujuan dan 7 (tujuh) indikator Kinerja, Ketujuh sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 (enam) indikator kinerja.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan KB	1. Persentase PUS yang Menjadi Peserta KB Aktif	87 %	87 %	100%
2. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) masyarakat tentang ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta dalam kemampuan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	2. Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif : a. Bina Keluarga Balita (BKB), b. Bina Keluarga Remaja (BKR), c. Bina Keluarga Lansia (BKL)	92,54% 93,47 % 91,34 %	92,54% 93,47 % 91,34 %	100% 100% 100%
3. Meningkatnya Pendapatan dan Sejahteraan Keluarga Pra KS dan KS 1	3. Persentase Jumlah Kelompok UPPKA yang Aktif	87,77%	87,77%	100%
4. Terpenuhinya Hak Anak	5. Jumlah Desa / Kelurahan Layak Anak.	2	2	100%
5. Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender	6. Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	21,43 % (3)	21,43 % (3)	100%
6. Meningkatnya penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	7. Persentase Penanganan Laporan Kasus Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak pada UPTD PPPA	100 %	100 %	100%

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2017 tentang Uraian tugas Unsur–unsur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.

Pembangunan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia yang akan memberikan kontribusi positif terhadap Peningkatan Usia Harapan Hidup masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan misi ke 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang didukung SKPD.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab maka instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berupa laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis sebagaimana keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam perspektif yang luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja

LKIP DPPKBP3A KAB.BARITO KUALA

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 merupakan implementasi dari instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang pemberantasan korupsi.

LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala merupakan hasil penilaian yang obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A. Dalam penyusunan LKIP ini masih banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan yang perlu mendapat saran dan kritik dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penyusunan lakip di masa yang akan datang.

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI Kedudukan DPPKBP3A

:

Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 pasal 2 (d) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Sebagaimana dalam pasal 2 (d) diatas bahwa, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) merupakan dinas dengan kategori Tipe B yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. TUGAS POKOK

Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2017 pasal 3 ayat 1 adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

b. FUNGSI

Fungsi DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala sesuai pasal 3 ayat 2 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 4) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

- 5) Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala (DPPKBP3A) berdasarkan pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala pada pasal 2 terdiri dari :

1. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat dibantu oleh :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Bidang Pengendalian Penduduk dibantu oleh :
 - a. Penata Kependudukan dan KB sebanyak dua orang
4. Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh
 - b. Penata Kependudukan dan KB sebanyak dua orang
5. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Anak
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah PPPA
7. Kelompok Jabatan Fungsional

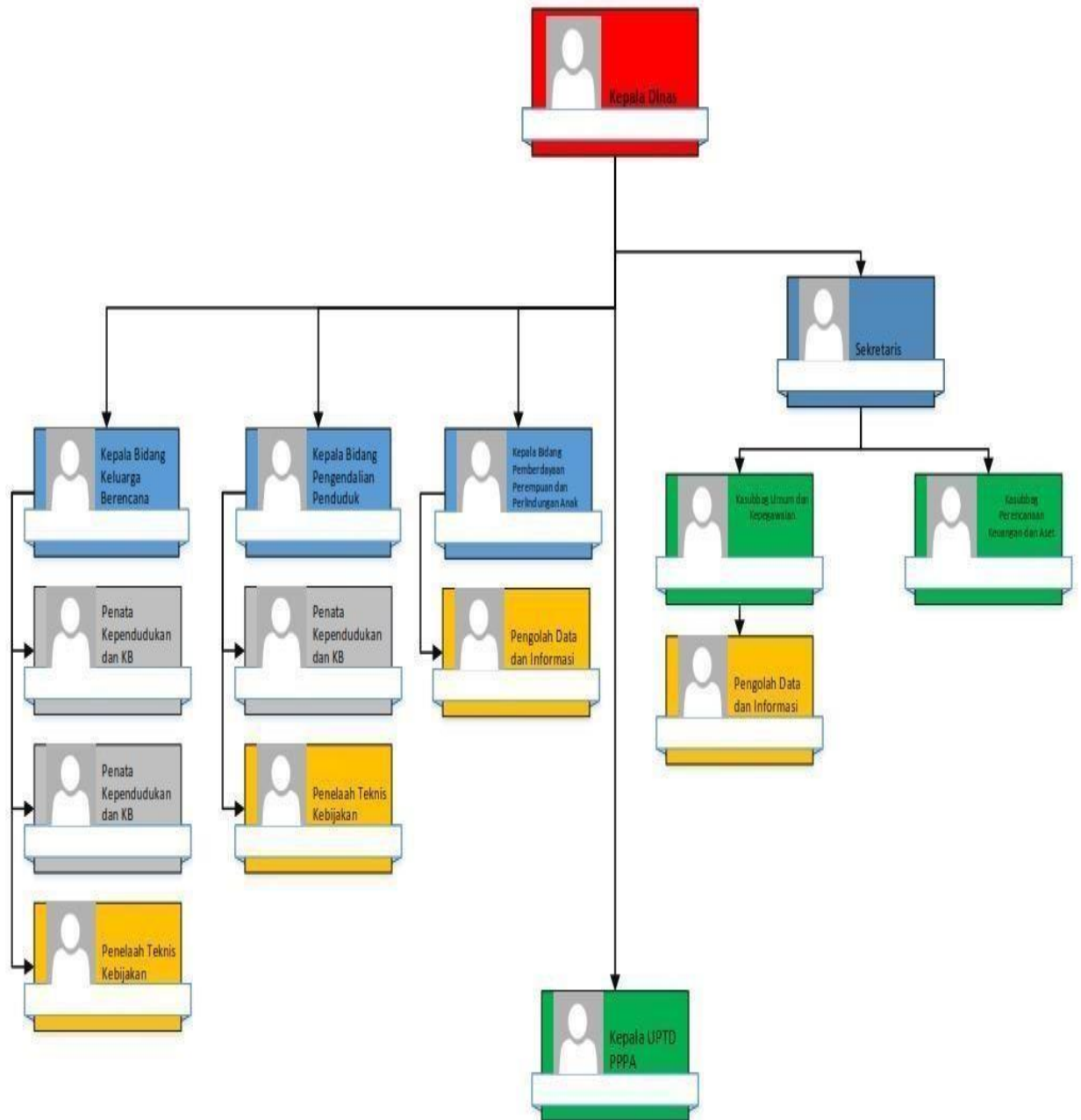
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari para Petugas Lapangan KB, yang sejak bulan Januari 2018 status kepegawaiannya menjadi pegawai Pusat. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya bersifat pembinaan dan pendayagunaan dalam penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Berikut Ini Bagan Dari Struktur Organisasi DPPKBP3A:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala



1.3. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito

Kuala :

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan tingginya angka drop out peserta KB.
 2. Perkawinan usia muda yang tinggi mengakibatkan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
 3. Pencapaian CPR / KB Aktif belum sesuai harapan.
 4. Laju Pertumbuhan Penduduk masih tinggi.
 5. Unmet Need masih tinggi.
 6. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Barito Kuala
 7. Tingkat kelangsungan pemakaian kontrasepsi MKJP menurun.
 8. Persepsi masyarakat tentang MKJP beragam dan belum seperti yang diharapkan.
 9. Masih rendahnya kualitas IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) sebagai ujung tombak pengelola program keluarga berencana.
 10. Keikutsertaan PUS dalam ber KB masih belum responsive gender
 11. Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsif Gender ke dalam Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
 12. Rendahnya keikutsertaan perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan dan ketrampilan serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan;
 13. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan
 14. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam partai politik.
 15. Masih rendahnya jumlah institusi Layak Anak.
 16. Masih rendahnya peran Forum Anak Desa dalam perencanaan pembangunan.
-
17. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

18. Masih rendahnya kualitas kelompok kegiatan bina keluarga (BKB, BKR, BKL dan UPPKA).
19. Masih rendahnya kualitas data base keluarga.
20. Rendahnya pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) tentang BKB, BKR, BKL, dan UPPKA bagi pengelola.
21. Keterbatasan akses modal usaha bagi Kelompok UPPKA terutama anggota dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

1.4 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala ini berdasarkan pada amanat Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala nomor: 70 Tahun 2018 tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, Maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi yang meliputi kedudukan dinas, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya pada DPPKBP3A

BABII : PERENCANAANDAN PERJANJIAN KINERJA

Memamaparkan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja secara singkat diantaranya visi, misi dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran serta indicator keberhasilan pencapaiannya.

BABIII : AKUNTABILITAS KINERJA

Merupakan inti dari LAKIP yang menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang telah diambil.Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan selama tahun 2023.

BABIV : PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja DPPKBP3A serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/240/KUM/2018 tanggal 4 Juni 2018 Tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 adalah :

- a. Mewujudkan keberlangsungan ber KB serta meningkatkan kualitas KIE dan pelayanan KB/KR serta mengendalikan angka kelahiran. Dengan indikator Meningkatnya kualitas kesertaan ber KB.
- b. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dengan indikator Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pemenuhan hak anak.
- c. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan indikator Meningkatnya kualitas perempuan yang aktif dalam pembangunan.

2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik selama 5 (lima) tahun periode 2023-2026.

Dengan demikian Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Terkendalnya Angka Kelahiran Total . Dengan indikator:
Angka Total Fertility Rate (TFR) (15 - 49)
- b. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. Dengan indikator Score Capaian KLA (Kabupaten Layak Anak)
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD. Dengan indikator Nilai Evaluasi Sakip SKPD

Berikut disajikan dalam bentuk table tujuan, sasaran, Indikator Sasaran dan Target kinerja.

Tabel 2.1.

Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja serta target kinerja Eselon II

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
Tujuan.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indikator Tujuan.1 Usia Harapan Hidup	Sasaran.1 Terkendalnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Indikator Sasaran.1.1 Angka Total Fertility Rate (TFR) (15 - 49)	2,32
		Sasaran.2 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indikator Sasaran 2.1 Score KLA	650
			Indikator Sasaran.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87

		Sasaran.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Indikator Sasaran.3.1 Nilai Evaluasi Sakip DPPKBP3A	83,5
--	--	---	--	------

B. PERJANJIAN KINERJA

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barito Kuala tahun 2023, bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

A. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2023 dapat dijabarkan sbb :

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Program/Kegiatan		Anggaran
Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Indeks	2,32	1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.856.374.705,-
					2	/ PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK/	425.227.350,-
					3	PROGRAM DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.082.425.060,-
Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	2	Score KLA	%	650	4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	203.435.830,-
					5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	46.748.550

Meningkatnya Kesetaraan Gender	3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka Indeks	88,61	6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	134.338.525,-
					7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	58.662.525,-
					8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	474.189.735
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD DPPKBP3A	4	Nilai Evaluasi SAKIP DPPKBP3A	Nilai	83,5	9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.916.389.519,-
T o t a l							12.084.997.849,-.

Pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barito Kuala Memiliki 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

1. Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR). Dengan indikator Kinerja TFR berdasarkan satuan angka indeks dengan target 2,32 mencakup 3 program/kegiatan Keluarga Berencana besaran anggaran berjumlah Rp. 6.364.027.115,-
2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator Kinerja :
 - a. Indeks Pembangunan Gender dengan target 87,00 mencakup 3 Program dengan besaran anggaran berjumlah Rp. 667.190.785,-

- b. berdasarkan indikator Score KLA (Kabupaten Layak Anak) memiliki target 650 mencakup 2 Program dengan besaran anggaran berjumlah RP. 250.184.380,-
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD DPPKBP3A memiliki target angka indeks 83,5 mencakup 1 (satu) Program dengan besaran anggaran sebesar Rp. 4.916.389.519

Jadi total anggaran keseluruhan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja berjumlah Rp. **12.084.997.849,-**.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2023-2026, RKT Tahun 2023, Renja Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2

Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90

2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

KI Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Sesuai ketentuan tersebut, Pelaporan Kinerja ini dibuat berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 188.4/006/DPPKBP3A/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah ditetapkan 3 (Tiga) Sasaran Strategis dan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan rincian sebagai berikut :

TERKENDALINYA ANGKA TOTAL FERTILITY RATE (TFR) Sasaran " Angka

Kelahiran Total (TFR) " merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Tujuan RPD ke 4 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung dengan indikator sasaran RPD Usia Harapan Hidup.

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Sasaran **"Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak"** merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Tujuan RPD ke 4 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung dengan indicator sasaran RPD Usia Harapan Hidup.

Meningkatnya Kesenjangan Gender

Sasaran **"Meningkatnya Kesenjangan Gender"** merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Tujuan RPD ke 4 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung dengan indicator sasaran RPD Usia Harapan Hidup.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A

Sasaran **"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A"** Tujuan RPD ke 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani dengan indicator sasaran RPD Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten

Untuk upaya pencapaian sasaran Strategis 1 yaitu Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR) ini Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan indicator :

1. Angka Kelahiran Total (TFR) (15 - 49)

Yang di maksud dengan Angka Kelahiran Total (TFR) (15 - 49) Adalah Jumlah Kelahiran pada kelompok umur 15-49 tahun di banding jumlah wanita usia subur (PUS) pada tahun yang sama di kali seribu sebagai konstanta untuk perhitungannya dapat menggunakan Formulasi Perhitungan sebagai

berikut :

$$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$$

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Target Tahun 2022	%
			Target	Realisasi			
1.	Angka Kelahiran Total (TFR) (15 - 49)	Angka Indeks	2,32	2,30	100,86	2,45	104,34
	Rata-rata				100,86		105,60

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023.

Indikator Kinerja Utama Angka Kelahiran Total (TFR) (15 - 49) berdasarkan Renstra 2023-2026, tahun 2023 ditargetkan 2,32.

Berdasarkan Data dari BKKBN

Bahwa Realisasi Angka Kelahiran Total (TFR) (15 - 49)) di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 adalah 2,30. Maka capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah 100,86 % $(2 \times 2,32 - 2,30 : 2,32 \times 100)$.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Angka Kelahiran Total Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Angka Kelahiran Total (TFR) (15-49)	Angka Indeks	2,32	2,30	100,86

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) : Angka Kelahiran Total dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,51	2,48	2,45	2.38	2.30

Dari table diatas Perbandingan Realisai Indikator Kinerja Terkendalnya Angka TFR dari tahun 2019 sebesar 2,5, tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,48 % tahun 2021 sama dengan tahun 2019 di tahun 2021 mengalami penurunan lagi sebesar 2,45 dan di tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup banyak sebesar 2,38 dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023 terhadap Target Akhir tahun Renstra

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 dan Sasaran Strategis DPPKBP3A Tahun 2023-2026, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun **2022**

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap (2023)
		Target	Realiasasi	Capaian		

Angka Kelahiran Total (TFR) (15 - 49)	2.32	2,32	2,30	100.86	2.00	100.86
Dapat dilihat dari table diatas bahawa capaian indicator kinerja utama untuk Angka TFR tahun 2023 dibandingakat dengan akhir rensta adalah sebesar 100,86 %						
2 x Target Akhir tahun Renstra – Realisasi Tahun Ini ----- Target Akhir Tahun Renstra X 100						

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Tabel 3.2. ...
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Angka Kelahiran Total (TFR) (15 - 49) dan Unmeet Need
Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

Indikator Kinerja Utama	2023			Target Akhir Renstra Provinsi / Nasional (2026)
	Target	Realiasasi	Capaian	
Angka Kelahiran Total (TFR) (15 - 49)	2,32	2,30	100.86	2.00

Dapat dilihat dari table diatas bahawa capaian indicator kinerja utama untuk Angka TFR tahun 2023 dibandingkan dengan Capaian di Provinsi dan Nasional adalah sebesar % 103,53

1.5 Analisa Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama.

Dengan melihat hasil evaluasi kinerja DPPKBP3A tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Kinerja DPPKBP3A telah melampaui dari target yang telah ditentukan. Adapun penyebab keberhasilan dari

capaian tersebut tersebut disebabkan adanya dukungan dari berbagai pihak sebagai mitra kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala serta partisipasi masyarakat yang sangat luar biasa dalam turut serta mempromosikan tentang Keluarga Berencana dengan slogannya **"2 Anak Lebih Sehat"**.

Hal ini di tandai dengan berhasilnya SKPD mengendalikan Angka TFR pada awal tahun Renstra (2013-2026) dari target Renstra akhir 2.32 dan dapat tercapai 2.32 di akhir tahun 2023.

Adapun kendala dan hambatan di tahun 2023 adalah Belum semua fasilitas kesehatan memiliki bidan terlatih/ tersertifikasi dalam pelayanan KB dan Kurangnya kuantitas SDM di Bidang yang ada di SKPD sehingga memerlukan ekstra kegiatan untuk memenuhi Perjanjian Kinerja Bidang dan juga untuk IKU yng berkenaan dengan Terkendalinya Angka TFR adalah masih sulitnya pengumpulan data yang akurat di tingkat lapangan/desa. Untuk anggaran Sebagian berasal dari adanya bantuan dana dari Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), untuk kendala antara lain :

1. masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemakaian alat kontrasepsi di Daerah Galcitas (tertinggal, terpencil, dan perbatasan) khususnya KB MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang).
2. banyaknya kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) belum berfungsi secara maksimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terhadap program Bangsa Kencana.
3. Rasio PLKB/PKB tidak sebanding dengan jumlah desa/kelurahan yang harus di bina, jumlah desa/kelurahan di kabupaten Barito Kuala sebanyak 2023 desa/kelurahan, sedangkan PLKB/PKB di kabupaten Barito Kuala sebanyak 28 orang, dan untuk tahun 2023 ada tambahan Penyuluh yang berasal dan ASN PPPK PLKB sebanyak 8 Orang, sehingga 1 PLKB/PKB itu rata-rata mempunyai 5-6 desa Binaan

4. Putus pakai Alokon (Droup out/berhenti menggunakan alokon)
Persentase jumlah anggota kelompok BKB yang ber KB di tahun 2023 dapat di realisasikan sebesar 79,76 atau di lihat dari capaian sebanyak 90,96 % dari target yang di tetapkan sebesar 87,68 %.

Persentase jumlah anggota kelompok BKR yang ber KB di tahun 2023 dapat di realisasikan sebesar 70,26 atau di lihat dari capaian sebanyak 77,38 % dari target yang di tetapkan sebesar 88,62 %

Persentase jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB di tahun 2023 dapat di realisasikan sebesar 67,24 atau di lihat dari capaian sebanyak 77,38 % dari target yang di tetapkan.

Dari hasil evaluasi di lini lapangan, tidak tercapainya target yang telah di tetapkan di sebabkan antara lain :

1. keterbatasan kemampuan kader untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu anggota kelompo BKB dan BKR serta UPPKS dan kaderkader di desa juga biasanya berfungsi ganda, artinya 1 orang kader bisa menjadi kader di beberapa kegiatan
2. Tidak ada honor untuk kader BKB dan BKR dalam melaksanakan kegiatan sehingga mereka kurang bersemangat.
3. untuk kegiatan kelompok UPPKS, tidak adanya bantuan modal usaha khususnya dari BKKBN, sedangkan anggota kelompok UPPKS ini rata-rata adalah KS I yang hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja.

Adapun Upaya-upaya yang telah di lakukan untuk mencapai Angka TFR dan tersebut termasuk juga dengan membangun komitmen dengan berbagai pihak sebagai mitra kerja DPPKBP3A untuk mendukung penggarapan program Kb di lapangan antara lain membangun komitmen dengan TNI, PKK, Kesehatan, kementerian Agama, kepolisian, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Petugas Lapangan KB, Kader dan Masyarakat. Strategi pemecahan masalah yang akan di laksanakan di tahun ini adalah:

1. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat khususnya di wilayah GALCITAS tentang pemakaian alat dan obat kontrasepsi KB khususnya KB MKJP dengan inovasi "SAKAJANG" (satu kampung KB satu Kontrasepsi jangka panjang), sehingga di harapkan dapat menekan angka droup Out atau putus pakai dalam menggunakan alat kontrasepsi yang rentan terhadap kehamilan tidak di inginkan (KTD).
2. Meningkatkan peran kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) terhadap program bangga kencana
3. Mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk merekrut Pegawai tidak tetap (PTT)/P3K penyuluh lapangan keluarga berencana.
4. Mengadakan pelatihan kepada kader-kader kelompok kegiatan

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Untuk mendukung pencapaian target Terkendalnya Angka Kelahiran Total (TFR) dialokasikan dana dalam DPA Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 sebesar Rp. 6.364.027.115, telah terealisasi Rp.6.345.597.560,- (99,71%). Sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,29 %

Tabel 3.1.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
DPPKBP3A Kab. Barito Kuala tahun anggaran 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terkendalnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR) (15-49)	100.86	99,71	0,29

Adapun penyebab keberhasilan dari capaian tersebut tersebut disebabkan adanya dukungan dari berbagai pihak sebagai mitra kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala serta partisipasi masyarakat yang sangat luar biasa dalam turut serta mempromosikan tentang Keluarga Berencana

1.7 Program / Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian

Kinerja Sasaran.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis "**Angka Kelahiran Total (TFR) (15 - 49)**" dengan indikator utama :

A. Indikator Utama 1 : "**Angka Kelahiran Total (TFR)**", dituangkan dalam Program :

1. **Program Keluarga Berencana**, dengan kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, yaitu dengan melakukan :
 - a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - b. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - d. Pengendalian Program KKBPK
 - e. Melakukan Pelayanan KB Keliling dalam rangka meningkatkan pencapaian peserta KB MKJP dalam rangka Bhaksos Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan
2. **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**, dengan kegiatannya :
 - a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP):
 1. Melakukan Sosialisasi Pembentukan Kampung KB.
 2. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

3. Melakukan Rapat Pembentukan Pokja Kampung KB
4. Melakukan Forum Musyawarah Desa.
5. Melakukan Pencanaan Kampung KB.
- b. Pengelolaan Data dan Informasi Program-Program KB, dengan melakukan :
 1. Melakukan Pengumpulan data dari semua kecamatan.
 2. Melakukan Pembuatan Dokumen Umpan Balik Program KKBPK
- c. Implementasi Pengendalian Penduduk, dengan melakukan :

Melakukan Sosialisasi kepada Generasi Muda tentang Isu-isu kependudukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pembangunan Nasional yang berwawasan kependudukan untuk meningkatkan SDM yang berkualitas menghadapi Bonus Demografi.
- d. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin melalui Pelayanan KB Keliling, dengan melakukan :
 1. Melakukan Koordinasi dg Petugas Lapangan KB dan Lintas Sektor.
 2. Melakukan Penyuluhan KB MKJP.
 3. Melakukan Penyiapan Alat Kontrasepsi.
 4. Melakukan Pelayanan KB.
 4. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan.
- c. Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR, dgn melakukan:
 1. Melakukan Sosialisasi KB Pria.
 2. Melakukan Pelayanan KB Pria.
 3. Melakukan pendataan Motivator Pria.

e. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling, dengan melakukan :

1. Melakukan Pengadaan Tempat Penyimpanan Alat Kontrasepsi.
2. Melakukan Pembangunan Balai PKB
3. Melakukan Pengadaan Sarana Kerja PPKBD / Sub PPKBD

d. Pembinaan Keluarga Berencana. Dengan melakukan :

1. Pembinaan dan bimbingan Operasional Balai Penyuluhan KB
2. Ops pendistribusian Alat Kontrasepsi ke fasilitas kesehatan.
3. Ops pembinaan dan penyuluhan KKBPK di Kampung KB.
4. Operasional Pembinaan Kader PPKBD dan Sub PPKBD.
5. Memberikan Media KIE dan Manajemen BOKB.

2. **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**, dengan kegiatan

a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan melakukan :

1. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
2. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
3. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan

b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan 1.

Koordinasi dengan Petugas Lapangan KB dan mitra kerja.

2. Pembentukan Kelompok BKR di Kampung KB 3.

Penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

4. Melakukan Pembinaan Kelompok BKR.

3. **Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi**

Jangka Panjang (MKJP), dengan kegiatannya :

a. Pelayanan Medis Operasi, yaitu dengan melakukan :

1. Melakukan pendataan calon akseptor MOW / MOP.

2. Melakukan Koordinasi dengan BKKBN Provinsi.

3. Melakukan Koordinasi dengan Petugas Lapangan KB

4. Menentukan jadwal pelayanan dan lokasi pelayanan.

5. Melakukan fasilitasi Pelayanan KB Medis Operasi ke Rumah Sakit.

4. **Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**, dengan kegiatannya :

a. Pengelolaan Program KKBPK, yaitu dengan melakukan :

1. Melakukan koordinasi dengan lintas bidang.

2. Melakukan koordinasi dengan Petugas Lapangan KB.

b. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, yaitu dengan melakukan :

1. Melakukan koordinasi dengan Petugas Lapangan KB.

2. Melakukan pelatihan ketrampilan usaha bg anggota kelp UPPKS

3. Melakukan kegiatan pameran dan gelar dagang produk kelompok UPPKS dalam rangka Harganas.

5. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak, dengan kegiatannya :

- a. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak, yaitu dengan melakukan:
 1. Melakukan koordinasi dengan Petugas Lapangan KB.
 2. Melakukan penyuluhan tentang pola Asuh Anak di kelompok BKB.
 3. Melakukan pembinaan kepada kelompok BKB

Untuk upaya pencapaian sasaran Strategis 2 yaitu **Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak** ini Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan indikator :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

2. Kabupaten Layak Anak (KLA)

Yang di maksud dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah suatu pembangunan Kab/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yg terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak, sedangkan yg di maksud dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan Dengan Formulasi Perhitungan :

Realisasi Tahun Ini ----- X 100 Target Tahun Ini

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran
Kabupaten Layak Anak (KLA)
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Target Tahun 2023	%
			Target	Realisasi			
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka Indeks	87.00	86.61	99,89	87,00	99,89
2.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka Indeks	650	714,09	118,8	601	118,8
	Rata-rata				109,34		109,34

2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023.

Indikator Kinerja Utama “ Indeks Pembangunan gender (IPG) ” berdasarkan Renstra 2023-2026, tahun 2023 ditargetkan 87,00 Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, bahwa Indeks Pembangunan gender (IPG) di Kabupaten barito Kuala pada tahun 2023 adalah 86,61 Maka capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah 99,89 % $(86,61 : 87,00 \times 100)$.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama “ Kabupaten Layak Anak (KLA) ” berdasarkan Renstra 2023-2026, tahun 2023 ditargetkan 601. Berdasarkan Data dari Evaluasi KLA berdasarkan penilaian mandiri 950,32 setelah di verifikasi dan di nilai dari Pusat melalui website dengan alamat www.evaluasikla.id, bahwa Score Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten barito Kuala pada tahun 2023 adalah 714,09 Maka capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah 118,8 % $(714,09 : 601 \times 100)$.

Tabel 3.3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Score Kabupaten Layak Anak (KLA)

Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks Pembangunan Keluarga (IPG)	Angka Indeks	87.00	86.61	99,89
Score Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka Indeks	650	714,09	118,8

2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan TahunTahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1.2
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
		2023	2024	2025	2026
Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	Score	87,00	88.00	89.00	90,00

Tabel 3.1.2
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Score Kabupaten Layak Anak (KLA)
Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
		2023	2024	2025	2026
Score Kabupaten Layak Anak (KLA)	Score	650	800	900	950

Indikator Kinerja DPPKBP3A tahun 2023 dari tahun ketahun perbandingannya meningkat. Untuk Tercapainya target tersebut di harapkan adanya dukungan dari pemerintah daerah dengan memberikan anggaran yang memadai dalam penanganan kasus kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah dilaporkan oleh masyarakat.

2.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Akhir Tahun Renstra

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 dan Sasaran Strategis DPPKBP3A Tahun 2026, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Terhadap Target Tahun 2023
Score Kabupaten Layak Anak (KLA)

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap (2026)
		Target	Realisasi	% Realisasasi		
Score Kabupaen Layak Anak (KLA)	601	601	714.09	118.80	950	75,16

2.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Score Kabupaten Layak Anak (KLA)
Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

Indikator Kinerja Utama	2023			Target Akhir Renstra Provinsi / Nasional (2023)
	Target	Realisasi	Capaian	
Score Kabupaten Layak Anak (KLA)	601	747	86,46	0

Dari table diatas perbandingan score KLA dengan provinsi tidak dapat disajikan tapi hanya peringkat yang kami sebutkan untuk Kabupaten Barito Kuala mendapat Peringkat Peratama untuk tahun 2023 dan perbandingan dengan Kabupaten Banjar mendapat peringkat Madya tahun 2023 (sumber <https://home.banjarkab.go.id/kabupaten-banjar-harapkanpenghargaanklamenjadi-madya-di-tahun-2023/>).

3.6 Analisis Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target

Indikator Kinerja Utama. Dengan melihat hasil evaluasi kinerja DPPKBP3A tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Kinerja DPPKBP3A telah mencapai target yang telah ditentukan. Keberhasilan kegiatan ini yaitu sudah di laksanakan penandatanganan komitmen antara Bupati Barito Kuala dan Anggota Gugus Tugas KLA. Untuk tahun 2023 Kabupaten Barito Kuala mendapatkan predikat pratama dengan nilai 714,09, adapun penilaian mandiri 950,32 seharusnya mendapat Predikat Madya tetapi karena ada penurunan nilai sehingga hanya mendapat predikat Pratama, adapun permasalahan dan

kendala kegiatan ini adalah belum semua anggota gugus tugas KLA melaksanakan pemenuhan hak anak sesuai klaster masing-masing dan data dukung yang belum sesuai dengan indikator yang di minta.

Tercapainya target tersebut disebabkan adanya dukungan dari pemerintah daerah dengan memberikan anggaran yang memadai dalam penanganan kasus kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target tersebut antara lain :

- a. Pembentukan Kelompok KDRT
- b. Pembentukan Forum Anak Daerah
- c. Memberikan pelatihan-pelatihan bagi kader
- d. Melakukan Sosialisasi
- e. Memberikan pelayanan kasus pengaduan
- f. Melaksanakan seminar

3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Untuk mendukung pencapaian target Kabupaten Layak Anak (KLA) dialokasikan dana dalam DPA Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 sebesar Rp. 348.705.490 telah terealisasi Rp. 337.884.952,- (96,89 %). Sehingga terdapat efisiensi sebesar 3,103 % (100 % - 96,89 %).

Tabel 3.3.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Score Kabupaen Layak Anak (KLA)	86,46	96,89	3,103
--	---------------------------------	-------	-------	-------

3.8 Program / Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak**” dengan indikator utama : Score Kabupaten Layak Anak (KLA), yang dituangkan dalam Program :

a. **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**, dengan Kegiatannya :

1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan melakukan :
 - a. Koordinasi dengan lintas sector terkait.
 - b. Temu Forum Anak Daerah.
 - c. Rapat Pengurus.
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Dokumen RAD KLA), dengan melakukan :
 - a. Rapat-rapat Tim Sekretariat gugus tugas KLA
 - b. Rapat koordinasi anggota Gugus tugas KLA
 - c. Penilaian / Evaluasi KLA oleh Kementrian PP PA RI berbasis website.

b. **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan**

Perempuan, dengan kegiatannya : Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah, dengan melakukan :

1. Sosialisasi Pencegahan KDRT.
2. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Pencegahan KDRT
3. Pelayanan Kasus berdasarkan pengaduan yang masuk.

Indek Pembangunan Gender (IPG)

Yang di maksud dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks

pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan

memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Dengan Formulasi Perhitungan :

$\frac{2 \times \text{Target Tahun Ini} - \text{Realisasi Tahun Ini}}{\text{Target Tahun Ini}} \times 100$
--

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran
Indek Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Target Tahun 2023	%
			Target	Realisasi			
1.	Indek Pembangunan Gender (IPG)	%	87,00	86,91	99,89	87,00	99,89
	Rata-rata				99,89		99,89

3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama 2023.

Indikator Kinerja Utama “ Indeks Pembangunan Gender ” berdasarkan Renstra 2023-2026, tahun 2023 ditargetkan 87,00. Berdasarkan Data dari Badan Statistik Kabupaten Barito Kuala, bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten barito Kuala pada tahun 2023 adalah 86,91. Maka capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah 99.89 % (2 x 87,00-86,91 : 87,00 X 100).

Tabel 3.2.1
Perbandingan Target dan Realisasi IKU

**Indeks Pembangunan Gender
Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	87,00	86,91	99,89
Rata-rata pencapaian kinerja sasaran				99,89

Dengan melihat hasil evaluasi kinerja DPPKBP3A tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Kinerja DPPKBP3A belum mencapai target yang telah ditentukan, Tidak tercapainya target tersebut disebabkan masih rendahnya partisipasi SKPD dalam perencanaan penganggaran yang Responsif Gender. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan adalah dengan melakukan bimbingan teknis kepada SKPD untuk penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1.2
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	88,61	88,11	87,61	87,11	86,91
--	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Dari table diatas dapat dilihat tahun 2019 sebesar 88,61 tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 88,11 dan tahun 2021 sebesar 87,61 mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 87,11 sedangkan tahun 2023 sebesar 86,91 sama dengan tahun 2023. Indikator Kinerja IPG di Tahun 2023 tidak mengalami penurunan, maka dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Kinerja DPPKBP3A mencapai target yang telah ditentukan, karena adanya partisipasi SKPD dalam perencanaan penganggaran yang Responsif Gender.

3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun Renstra

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 dan Sasaran Strategis DPPKBP3A Tahun 2023-2026, dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3.2.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap (2026)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,00	87,00	86,91	99.89	88,61	98,26

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

Indikator Kinerja Utama	2023	Target Akhir Renstra Provinsi /
-------------------------	------	---------------------------------

	Target	Realisasi	Capaian	Nasional (2023)
Indek Pembangunan Gender (IPG)	87,00	86,91	99,89	0

Perbandingan indikator Indek Pembangunan Gender IPG dengan Provinsi tidak bisa disajikan karena provinsi menggunakan indikator IDG karena itu tidak bisa membandingkan capaian kinerja dengan Provinsi sehingga tidak dapat menyajikannya di dalam tabel diatas.

2.5 Analisis Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama.

Dengan melihat hasil evaluasi kinerja DPPKBP3A tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Kinerja DPPKBP3A belum mencapai target yang telah ditentukan, Tidak tercapainya target tersebut disebabkan masih rendahnya partisipasi SKPD dalam perencanaan penganggaran yang Responsif Gender. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan adalah dengan melakukan bimbingan teknis kepada SKPD untuk penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender.

2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Untuk mendukung pencapaian target Indeks Pembangunan Gender (IPG) dialokasikan dana dalam DPA Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 sebesar Rp. 670.339.005,- telah terealisasi Rp. 648.751.993,- (96,77 %). Sehingga terdapat efisiensi sebesar 3,22 % (96,77 % - 99,89 %).

Tabel 3.2.4

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100	96,77	3,22

2.7 Program / Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “ **Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak** ” dengan indikator utama :

Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang dituangkan dalam Program:

- a. **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**, dengan Kegiatannya : Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan, dengan melakukan kegiatan bimbingan teknis pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran yang responsif gender.
- b. **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**, dengan kegiatannya Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender.
- c. **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**, dengan kegiatannya
 1. Pembinaan Organisasi Perempuan, dengan melakukan :
 - a. Rapat persiapan Peringatan Hari Ibu dan Peringatan hari Kartini dan Seminar Hari Ibu.
 - b. Melaksanakan Peringatan Hari Ibu dan Peringatan hari Kartini.

- c. Melaksanakan Seminar Hari Ibu yang diikuti oleh Organisasi Perempuan.
2. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera, dengan melakukan :
 - a. Melakukan Rapat TP2KD
 - b. Melakukan Pembinaan TP2KD TK Kabupaten
 - c. Pembinaan TP2KD Tingkat Provinsi Kal Sel.
 - d. Melakukan Evaluasi / Penilaian TP2KD TK Provinsi.
 - e. Melakukan kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

3.1 Capaian Kinerja DPPKBP3A

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 188.4/ /DPPKBP3A/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama DPPKBP3A Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
----	-------------------	-----------	--------	--------	-----------	--------------

1	Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR) (15 - 49)	Indeks	2,32	2,30	100,87
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Score Capaian KLA	Indeks	601	714,09	118,81
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	87,00	86,91	99,89

Tabel 3.1.2

**Capaian IKU DPPKBP3A
Berdasarkan Persentase
Tahun 2023**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	3

Tabel 3.1.3 Capaian IKU DPPKBP3A Berdasarkan Kategori Tahun 2023

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	4
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0

4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja Tahun 2023.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor 188.4/006/DPPKBP3A/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah ditetapkan 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut : **Tabel**

3.2.1

Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator DPPKBP3A

Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	TFR	1 indikator
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Score Capaian KLA	2 indikator

	IPG	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD DPPKBP3A	Nilai Evaluasi Sakip DPPKBP3A	1 indikator

Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran DPPKBP3A Tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	TFR	1	100,87	Melebihi target
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	2	99,89	Sesuai target
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD DPPKBP3A	1	98,20	Sesuai target

Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran DPPKBP3A Tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 -64,99 Kurang	65 74,99 Cukup	75 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	1	100,87					Sangat baik
2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	2	99,89					Sangat baik
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD DPPKBP3A	1	98,20					Sangat baik

Tabel 3.2.4 Pencapaian Target Sasaran Strategis DPPKBP3A Tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian		
				Melebihi target (>100)	Sesuai target (=100)	Dibawah target (<100)

				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Terkendalnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1	100,87	2	100,71				
2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	2	99,89	1	164,86				
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD DPPKBP3A	1	98,20	1	100	1	100		

Sasaran Strategis 1: Terkendalnya Angka Kelahiran Total (TFR) akan diketahui melalui para petugas lapangan yang melakukan Pendataan Keluarga. **Sasaran**

Strategis 2: Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak akan dicapai melalui score yang didapat pada masing-masing kabupaten pada satu propinsi dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) diketahui dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat yang didapat melalui kuisiuner yang sudah didistribusikan.

Untuk melihat capaian sasaran strategis DPPKBP3A, maka ada 4 indikator kinerja yang digunakan, yaitu: 1. Angka Kelahiran Total (TFR, 2. Score Capaian KLA, dan 3. Indeks Pembangunan Gender 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD DPPKBP3A

Capaian masing-masing sasaran dengan 4 indikator tersebut pada tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.5 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2022		Ket.
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Indeks	2,30	100,87	2,32	100,87	
2.	SCORE KLA	Angka Indeks	714,09	118,81	650	86,46	
3.	IPG	Angka Indeks	86,91	99,89	88,61	100,53	
4.	Nilai Evaluasi Sakip SKPD	Nilai	82,00	98,20	83,05	100,41	

Capaian indikator Sasaran 1. Terkendalnya Angka Kelahiran Total (TFR) didukung oleh program Keluarga Berencana dengan kegiatan Pelayanan Kontrasepsi. Keberhasilan capaian Indikator Sasaran 1. Angka Kelahiran (TFR) disebabkan oleh: Tingginya partisipasi masyarakat. Saran untuk bisa mempertahankan keberhasilan adalah dengan selalu konsistennya dukungan dari masyarakat dan pemerintah baik berupa SDM dan juga finansial.

Capaian indikator Sasaran 2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak didukung oleh program penguatan kelembagaan dengan kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG dan anak. Keberhasilan capaian Indikator Sasaran 2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak ini tidak terlepas dari keseriusan pemerintah melalui aparat yang terlibat didalamnya dalam mengawal dan melaksanakan program ini.

Capaian indikator Sasaran 2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak didukung oleh program peningkatan peran serta kesetaraan gender dengan kegiatan pembinaan organisasi perempuan dan penyuluhan bagi perempuan dalam membangun keluarga sejahtera. Keberhasilan capaian Indikator Sasaran 2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak ini tidak terlepas dari adanya komitmen pemerintah dalam mendukung program ini.

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator SASARAN	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2026	Selisih	Ket.
			Capaian	Capaian	Capaian (%)	
1.	TFR	INDEKS	2,30			
2.	SC KLA	INDEKS	714,61			
3.	IPG	INDEKS	86,61			
4.	Evaluasi SAKIP	Nilai	83,5			

Karena tahun 2023 ini adalah tahun awal RENSTRA maka tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2026/kondisi awal renstra.

Tabel 3.2.7
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

No	Indikator SASARAN	Satuan	Relisasi 2023	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	TFR	INDEKS	2,30			
2.	SC KLA	INDEKS	714,61			
3.	IPG	INDEKS	86,61			
4.	Evaluasi SAKIP	Nilai	83,5			

Dari tabel di atas bisa kita ketahui perbandingan capaian realisasi terhadap capaian realisasi provinsi dan Nasional.

Untuk indikator sasaran sebagai berikut:

1. Angka Kelahiran Total (TFR) masih di bawah dari propinsi dan nasional
2. Score Capain KLA tidak ada capaian untuk propinsi dan nasional, karena propinsi masih tergantung kabupaten apabila kabupaten bisa memenuhi

score **KLA** (Kota Layak Anak) minimal 501 maka propinsi baru bisa menentukan target dan berstatus Provilia (Propinsi Layak Anak) begitu juga dengan Nasional yang tergantung kepada propinsi, apabila seluruh propinsi sudah berstatus **Provilia** (Propinsi Layak Anak) maka tingkat Nasional bisa menyandang status **Idola** (Indonesia Layak Anak)

3. Indeks Pembangunan Gender sama halnya dengan KLA namun belum mencapai rumusan final dalam capaian realisasi untuk skala propinsi dan Nasional.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 12.183.611.353,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.651.969.733,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,64 %.

Komposisi belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 Komposisi Belanja DPPKB3A Tahun Anggaran 2023
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	10.513.043.681,00	10.017.347.637,00	95,28
2	Belanja Tidak Langsung	1.670.567.672,00	1.634.622.096,00	97,85

Jumlah	12.183.611.353,00	11.651.969.733,00	95,64
---------------	-------------------	-------------------	-------

Sumber: RFK 1 DPPKBP3A

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 95,28 % terhadap realisasi belanja Langsung DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala tahun 2023, dan sisanya sebesar 97,85 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Renstra DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. **6.623.132.700,-** dengan realisasi sebesar 5.728.721.816,- Atau 90,35% , dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja DPPKBP3A Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	TFR	6.364.027.115	6,345,597,560	99,71
2	SC KLA	348.705.490,00	337,884,952	96,89
3	IPG	670.339.005,00	648.751.993	96,77
	Jumlah	7.383.071.610,00	7.332.234.505	99,31

Sumber: RFK 1 DPPKBP3A

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023.

Analisa Efisiensi

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR) (15 – 49)	100,87	99,72	0,19
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Score Kabupaen Layak Anak (KLA)	100,53	99,18	0,01
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,46	99,14	1,72

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 3 sasaran menunjukkan pencapaian 95,92% yaitu sebanyak 4 Indikator. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV PENUTUP 4.1 KESIMPULAN

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala sebagai SKPD yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan tidak langsung kepada masyarakat agar berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, Sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini didukung data sebagai berikut :

- SASARAN 1 : Persentase Menurunnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ber-KB, mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 100%
- SASARAN 2 : Terpenuhinya Hak Anak. Sasaran ini mendapat predikat nilai **SangatTinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 100%.
- SASARAN 3 : Pesentase Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sasaran ini mendapat predikat nilai **SangatTinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 100%.

4.2 KENDALA YANG DIHADAPI ATAS CAPAIAN KINERJA DPPKBP3A

Kendala yang menjadi perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Kurangnya Peran KB Pria terhadap Program KB;
2. Tempat pelayanan KB Pria yang sangat terbatas;
3. Keterbatasan PLKB sebagai pembina dan pengarah Institusi Masyarakat Pengelola KB (IMP);
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana pengarah Institusi Masyarakat Pengelola KB (IMP);
5. Kurangnya dukungan operasional lini lapangan;
6. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan Kader dalam mengelola IMP
7. Kurangnya sosialisasi dan sinkronisasi tata cara penanganan korban tindak kekerasan kepada unsur-unsur pelaksana teknis di lingkungan Kabupaten dan

daerah domisili korban dan tempat kejadian perkara;

8. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pengarusutamaan Gender;
9. Masih kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan terutama dalam penanggulangan kemiskinan;
10. Belum semua pengambil kebijakan pembangunan mengintegrasikan kepentingan dan kebutuhan anak dalam setiap program dan kegiatan yang berdampak pada situasi dan kondisi anak;
11. Masih kurangnya pemahaman tentang perlindungan anak di masyarakat;
12. Belum Optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap Kesetaraan Gender disemua sektor pembangunan;
13. Banyaknya materi-materi bermuatan pornografi yang membawa dampak buruk bagi masyarakat terutama generasi muda sehingga berpotensi terjadinya kejahatan seksual, berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang;
14. Pendewasaan Usia Pernikahan belum sepenuhnya menyentuh kalangan pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan.

4.3 SARAN/REKOMENDASI/PEMECAHAN

Langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan kinerjanya adalah:

1. Meningkatkan Promosi, KIE dan Pelayanan KB Pria di daerah (mulai Desa/Kelurahan s/d Kecamatan).
2. Meningkatkan dan melakukan pembenahan tempat Pelayanan KB Pria, dengan memberikan Sarana dan Prasarana yang memadai.
3. Melakukan pengusulan kebutuhan penambahan tenaga Penyuluh Lapangan KB baik ke Bupati, Provinsi maupun ke Pusat serta meningkatkan kapasitas Petugas Penyuluh Lapangan KB.
4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Kader dalam mengelola IMP melalui Sosialisasi dan Pelatihan.
5. Memberian Sarana dan Prasarana Kader IMP dalam pelaksanaan program KB di tingkat lini lapangan.
6. Melaksanakan program kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis penyusunan program kegiatan pembangunan yang responsive gender bagi

SKPD Kab/Kota;

7. Meningkatkan pendataan, pemantauan, dan evaluasi yang mendukung penyelenggaraan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat Kabupaten/kota;
8. Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada SKPD terkait dan masyarakat di semua lapisan.
9. Melakukan upaya penerapan Pengarusutamaan Gender mulai dari Perencanaan, Implementasi Anggaran dan Monitoring Evaluasi serta Pelaporan pada semua SKPD dan kegiatan Sosial, Politik, dan Keagamaan yang ada di masyarakat.
10. Melakukan pengusulan kebutuhan penambahan tenaga Penyuluh Lapangan KB baik ke Bupati, Provinsi maupun ke Pusat serta meningkatkan kapasitas Petugas Penyuluh Lapangan KB.
11. Memberikan pemahaman kepada kalangan pondok pesantren, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan bahwa pernikahan usia dini akan membawa dampak negative diantaranya belum matang secara fisik dan psikis.
12. Dukungan dari semua pihak untuk membuat terobosan baru dalam penyusunan program kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Barito Kuala.

4.4 PELUANG YANG ADA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PELAYANAN DPPKBP3A

Dari tantangan yang harus dihadapi maka peluang yang ada harus diambil dalam upaya pengembangan pelayanan SKPD, beberapa peluang yang ada terkait dengan hal tersebut diantaranya adalah :

1. Komitmen Pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditujukan dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019, yang harus ditindak lanjuti mulai dari Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota.
2. Komitmen mitra kerja dengan lintas sektoral, Pemerintah Daerah, Swasta, LSM dan masyarakat sampai saat ini berpeluang untuk lebih ditingkatkan dalam mendukung kebijakan program KB Nasional di Kabupaten Barito

Kuala.

3. Ketersediaan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari Pusat terutama untuk penduduk miskin selama ini masih tersedia dan akan terus didukung melalui pendanaan dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten sesuai kebutuhan.
4. Peningkatan kompetensi provider bagi Bidan dan Dokter melalui pelatihan klinis IUD, MOP dan MOW serta pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan pemberian *informed consent* sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat di klinik KB Pemerintah dan Swasta.
5. Pemanfaatan secara maksimal hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang KB selama 4 (empat) Tahun terakhir yang berupa pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB, untuk meningkatkan kualitas pelayanan SKPD.
6. Peningkatan pembinaan dan penggerakan lini lapangan dengan mendorong upaya peningkatan kualitas tenaga lapangan dengan pelatihan maupun pembinaan organisasi profesi Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpeKB).
7. Tujuan Utama/Goals MDGs (*Millenium Development Goals*) salah satunya "Mendorongdan Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan" dengan target memperkecil kesenjangan gender pada sekolah dasar dan sekolah menengah, hal ini wajib ditindak lanjuti dan didukung mulai dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
8. Berdasarkan data dan fakta tentang kondisi perempuan dan anak, terutama yang berkaitan dengan isu perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, pengabaian dan penelantaran, masih ada peluang untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban kekerasan, melalui komitmen yang kuat dengan lintas sektoral, LSM, Pelayanan yang telah dibentuk, dan Pemerintah Daerah.
9. Sifat gotong-royong masyarakat dan kepeduliannya terhadap kasus tindak kekerasan yang dapat dilihat dari adanya laporan dari masyarakat yang masuk merupakan peluang yang harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan sinergi antara pelayanan terpadu dengan masyarakat luas untuk menghapuskan tindak kekerasan dan menolong korban-korban yang memerlukan.

Demikian laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggung

jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang sudah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Marabahan, 31 Januari 2024
Kepala DPPKBP3A
Kabupaten Barito Kuala

H. PURKAN, SH
NIP. 19650103 1992030 1 001